

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDGs bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, kerusakan lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Poin yang terdapat di dalam SDGs berjumlah 17 dan masing-masing poin memiliki tujuan yang saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kesejahteraan manusia dan menyoroti kebutuhan mendesak akan tindakan transformatif. Udara bersih dapat menjadi katalisator untuk mendorong kesehatan dan kesejahteraan manusia. Udara bersih memiliki dampak positif yang signifikan terhadap beberapa tujuan, berkontribusi langsung terhadap SDG nomor 3 Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik, dan SDG nomor 7 Energi yang bersih dan terjangkau, selanjutnya berkontribusi secara tidak langsung terhadap seluruh poin SDGs yang berjumlah 17.

Pada poin ketiga dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat 38 target di sektor kesehatan yang harus dicapai, salah satunya berkaitan dengan pencemaran dan polusi udara. Masalah ini masih sulit diatasi di Kota Bekasi akibat tingginya jumlah kendaraan serta banyaknya aktivitas industri dan pabrik.

Nicholas (2010) dalam Harbani Pasolong menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu campuran yang saling berhubungan antara hal yaitu teori dan praktik yang mempunyai sasaran untuk mempromosikan pemahaman terhadap

pemerintah dalam mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosialnya. Menurut Herbert Simon dalam Pasolong (2010:14) terdapat prinsip empat prinsip utama dalam administrasi, yaitu: Menaikkan efisiensi melalui pembagian tugas secara khusus di antara anggota kelompok; menaikkan efisiensi dengan menempatkan anggota organisasi dalam struktur hierarki yang jelas; menaikkan efisiensi dengan memberi batas antara rentang kendali dalam setiap sektor organisasi agar jumlahnya lebih sedikit; menaikkan efisiensi dengan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tujuan, proses, pelanggan, dan lokasi untuk keperluan pengawasan.

Ilmu administrasi, khususnya Administrasi Publik, dituntut untuk menjadi solusi nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan publik dalam suatu negara. Seiring dengan pertumbuhan dan dinamika sosial, permasalahan dalam kehidupan masyarakat terus berkembang, menjadi semakin kompleks, dan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan efisien. Beberapa masalah saling berkaitan, sementara yang lain bertolak belakang, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih susah. Oleh karena itu, administrasi publik memerlukan suatu dimensi yang mampu memberikan solusi terhadap kondisi tersebut, yang dikenal sebagai kebijakan publik. Dimensi ini berperan dalam menganalisis proses pembentukan masalah dalam pemerintahan dan masyarakat, menentukan solusi, mengimplementasikan kebijakan, serta melakukan evaluasi.

Evaluasi digunakan untuk menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang menganalisis berbagai aspek. Salah satunya aspek efektivitas, efisiensi,

kecakupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sebagai sasaran utama. (Dunn, 2000;608).

Kebijakan ini berfungsi untuk pedoman dan petunjuk bagi semua aparatur pemerintah, tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Kansil dan Cristine, 2008;190)

Udara terdiri dari berbagai komponen yang terdiri dari gas, partikel padat, partikel cair, energi, ion, dan zat organik dan tersebar secara tidak beraturan dan menyesuaikan bentuk volume ruang yang ditempatinya. Udara membentuk atmosfer yang mengelilingi bumi dan memiliki peran krusial bagi kehidupan. Salah satu elemen penting dalam udara adalah oksigen atau O_2 , yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Kandungan utama dari udara yaitu uap air atau H_2O yang dipengaruhi oleh tekanan udara, temperatur, dan kondisi lingkungan. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernapas, yang dihirup melalui paru-paru. Jika udara yang dihirup tercemar, maka dapat berisiko membahayakan kesehatan paru-paru. (Wardhani, 2015).

Polusi udara terjadi karena adanya peningkatan zat fisika atau kimia pada atmosfer bumi hingga mencapai tingkat yang dapat dikenali oleh manusia. Pada tahapan ini dapat diukur secara langsung melalui pengukuran dan berpotensi memberikan efek negatif bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Pencemaran udara merupakan kondisi kualitas udara yang memburuk akibat terkontaminasi oleh berbagai zat, mulai dari yang tidak berbahaya sampai zat yang dapat

membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran udara biasa terjadi di daerah yang memiliki kawasan industri dan penggunaan kendaraan sehingga hal ini menyebabkan gas yang terkandung melebihi batas normal.

Menurut Soedomo (dalam Cahyono, 2016), adanya pencemaran udara ini terjadi karena jumlah zat pencemar yang masuk ke atmosfer itu sangat besar sehingga dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara. Penurunan ini dapat dipicu oleh faktor alami atau aktivitas manusia. Contoh pencemaran udara alami meliputi asap kebakaran hutan, abu vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi, serta partikel garam yang berasal dari air laut. Sementara itu, pencemaran udara akibat aktivitas manusia dapat berasal dari sektor transportasi, industri, serta pembakaran sampah rumah tangga. (Pohan, 2002).

Udara memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, udara termasuk ke dalam sumber daya alam yang harus dijaga demi kelangsungan hidup semua makhluk. Sebagai elemen vital dalam kehidupan, penurunan kualitas udara dapat berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga mutu dan kebersihannya perlu selalu dipertahankan. Isu pencemaran udara menjadi sebuah tantangan yang mendesak di Indonesia, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Salah satu wilayah yang terdampak secara signifikan adalah Kota Bekasi.

Kota Bekasi berperan sebagai salah satu daerah penyangga bagi metropolitan Jakarta. Akibatnya, jumlah penduduk serta mobilitas di Kota ini terus

mengalami peningkatan. Bertambahnya populasi juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi, berkurangnya luas area vegetasi, serta bertambahnya volume limbah harian yang dihasilkan masyarakat. Pencemaran udara masih menjadi tantangan utama di kota-kota besar. Keberadaan polutan di udara dapat membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara menjadi langkah yang sangat penting untuk dilakukan.

Salah satu tantangan terbesar bagi makhluk hidup adalah pencemaran udara. Alasannya karena menjadi permasalahan yang serius yang ada di seluruh dunia, termasuk Kota Bekasi. Pencemaran udara dapat mempunyai dampak negatif bagi kesehatan makhluk hidup, ekosistem, dan ekonomi lokal sehingga pencemaran udara menjadi prioritas penting.

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi terbilang sangat tinggi, sementara kapasitas jalan yang tersedia kurang mampu menampung seluruh kendaraan yang ada, kondisi ini mengakibatkan kemacetan yang hampir terjadi setiap hari, diperburuk oleh rendahnya disiplin para pengguna jalan. Kemacetan ini berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas buang, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas udara.

Transportasi menjadi sarana mobilitas yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di era modern ini. Hal ini terlihat dari beragam jenis kendaraan yang memenuhi jalan raya, seperti sepeda motor, mobil, truk, bus, bahkan pesawat yang melintasi langit kota. Meskipun transportasi sangat

membantu dalam memperlancar aktivitas manusia, sebagian besar kendaraan bermotor justru menjadi penyumbang utama pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi telah melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas udara selama tiga bulan terakhir sejak Juni 2023 – Agustus 2023. Berdasarkan data rata-rata kualitas udara dalam periode tersebut, udara di Kota Bekasi dikategorikan dalam tingkat “Sedang” berdasarkan parameter PM 10 dan PM2.5. Berdasarkan Peraturan Menteri KLHK RI P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), beberapa parameter utama dalam pemantauan kualitas udara meliputi Partikulat Molekul (PM)10, PM2.5, Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO₂), dan Hidrokarbon (HC).

Sebagai turunan dari Peraturan Menteri KLHK RI, dibuat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menjadi pedoman dalam mengelola kualitas mutu udara di Kota Bekasi. Hingga saat ini, peraturan tersebut masih berlaku, namun perlu dievaluasi efektivitas pelaksanaannya mengingat tingginya tingkat pencemaran udara di wilayah tersebut. Perda ini menegaskan bahwa pengendalian kualitas mutu udara di Kota Bekasi harus dilakukan untuk menjaga fungsinya dalam mendukung kesehatan manusia serta memberikan rasa aman terhadap makhluk hidup lainnya.

Pada Pasal 1 Ayat 11 dalam perda ini mengenai pencemaran udara, dijelaskan bahwa pencemaran udara adalah masuknya zat yang disebabkan oleh

ulah manusia. Akibatnya kualitas udara setiap waktu selalu menurun. Selain itu, aturan ini membahas mengenai batas maksimal emisi gas buang kendaraan bermotor, yaitu batas tertinggi dari energi dan/atau komponen lain yang berpotensi mencemari udara, yang dikeluarkan langsung melalui saluran pipa gas buang kendaraan bermotor.

Aspek penting dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara meliputi pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari udara. Pengawasan ini fokus pada kepatuhan terhadap peraturan pengendalian pencemaran udara, pemenuhan persyaratan izin pembuangan limbah udara, serta pengendalian emisi gas kendaraan bermotor. Komitmen pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi dalam mengendalikan polusi udara diwujudkan melalui penerapan empat langkah utama untuk mengurangi bahan pencemar, yaitu penerapan kawasan bebas rokok, uji emisi kendaraan dan pengukuran tingkat kebisingan, pemantauan penggunaan bahan bakar gas, serta penyelenggaraan *car free day*.

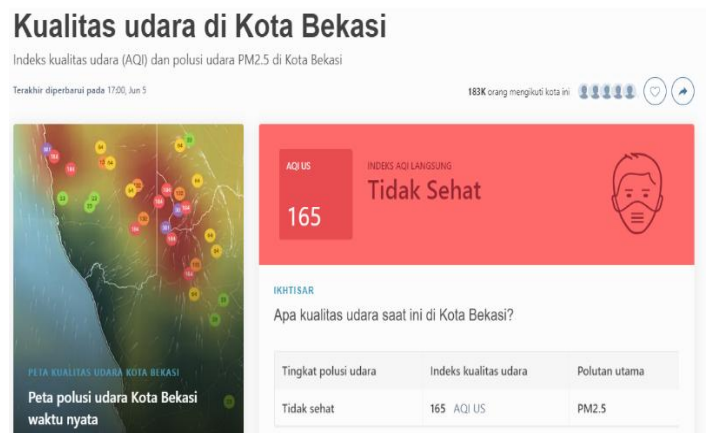
Dalam perkembangannya, penerapan keempat langkah strategis tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung program diversifikasi energi. Dari sisi lingkungan, berkurangnya emisi gas buang berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dengan menekan sumber pencemaran menurut *National Pollution Prevention Center (NPPC)* dan *Environmental Protection Agency (EPA)*. Dampaknya terhadap kesehatan juga dapat dikendalikan dengan menurunnya risiko penyakit akibat polusi udara, sehingga lingkungan yang lebih bersih dapat

berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Jika pengelolaan kualitas udara di Kota Bekasi tidak dilakukan dengan baik, dampak negatif terhadap kehidupan akan semakin besar. Oleh karena itu, perlindungan mutu udara sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan hidup, baik bagi generasi saat ini maupun pada generasi mendatang. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas udara tetap berada dalam batas aman bagi kehidupan, sesuai dengan standar baku mutu ambien dan status kualitas udara ambien yang telah ditetapkan.

Penggunaan energi dari bahan bakar minyak (BBM) terus mengalami peningkatan di berbagai sektor, baik dalam sektor domestik maupun terutama di sektor industri dan transportasi. Tanpa disadari, dominasi penggunaan BBM memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara, terutama di kota-kota besar, ibu kota provinsi serta ibu kota kabupaten. Sektor transportasi, yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara menjadi salah satu pengguna terbesar bahan bakar minyak. Penggunaan BBM dalam sektor ini menunjukkan tren peningkatan yang terus berlanjut.

Kualitas udara pada daerah ini secara terus menerus mengalami penurunan, bahkan setara dengan menghirup asap dari 97 batang rokok dalam satu waktu. Hal ini membuat kondisi Kota Bekasi menduduki posisi ketiga dengan kota yang mempunyai tingkat pencemaran udara tertinggi di Indonesia. Untuk skor dari Kota Bekasi mencapai skor 97 dengan kategori “tidak sehat”. Sementara itu, rata-rata Indeks Kualitas Udara di Jawa Barat masih jauh dari target nasional sebesar 84,50. Pada tahun 2021, IKU di wilayah Jawa Barat hanya menyentuh angka 79,34,

sehingga ini menandakan perlunya strategi untuk mengatasi krisis pencemaran udara. Situasi ini tergambar jelas pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kualitas Udara Di Kota Bekasi

Sumber: Aplikasi IQ AIR

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa kualitas udara Kota Bekasi mendapatkan skor 158. Pengaruh dari skor masuk ke dalam kategori tidak sehat sehingga terdapat risiko gangguan kesehatan pada jantung dan paru-paru meningkat, terutama bagi kelompok yang sensitif. Masyarakat umum disarankan untuk membatasi aktivitas diluar ruangan, hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan munculnya gejala pernapasa. (Menurut IQ Air).

Selain itu pada tahun 2023 Kota Bekasi juga menempati urutan ke 3 sebagai kota dengan PM2.5 tertinggi di Indonesia, Kota Bekasi mendapatkan skor 49.9. PM2.5 adalah partikel halus yang melayang diudara dan mempunyai diameter sekitar 5 milimeter atau bahkan lebih kecil. Hal ini mengakibatkan partikel dapat masuk ke dalam aliran darah melalui pernapasan karena ukurannya yang sangat

kecil sehingga dapat mengancam kesehatan. Kondisi ini didukung oleh data dari IQ Air yang menunjukkan Kota Bekasi berada di urutan ketiga dengan skor PM2.5.

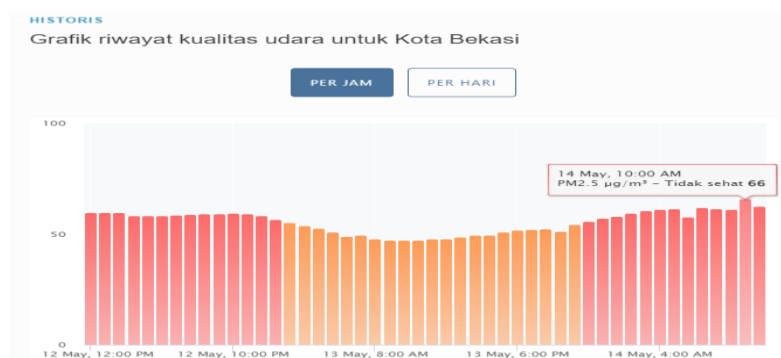


Gambar 1. 2 Skor PM2.5 Kota Bekasi
Sumber : Aplikasi IQ AIR

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa, Kota Bekasi menempati urutan ketiga dari berbagai kota di Indonesia. PM 2.5 dapat berasal dari berbagai sumber, baik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, sumber daya alam, maupun terbentuk akibat reaksi polutan. Beberapa penyebab utama PM2.5 meliputi pembakaran yang dihasilkan dari operasional pembangkit listrik; asap dan jelaga yang dihasilkan oleh pembakaran kendaraan bermotor; emisi gas buang serta proses pembakaran dalam kendaraan bermotor; dan proses industri yang melibatkan reaksi kimia antara berbagai jenis gas.

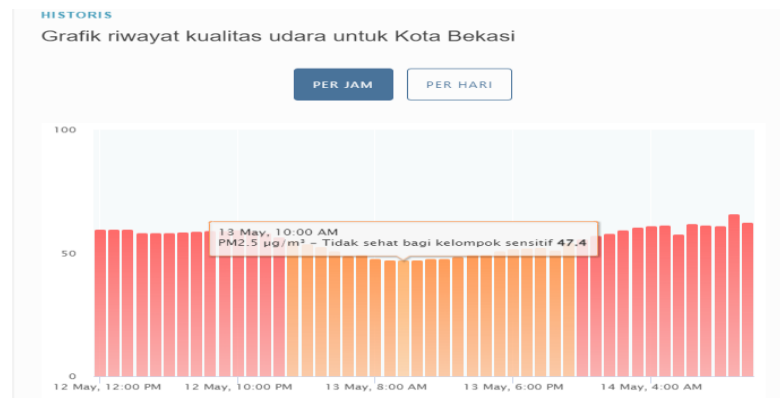
Menurut WHO kualitas udara itu mempunyai rentang konsentrasi PM 2.5 dengan mean 24 jam dan berkisar 0-15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Sementara itu, perkembangan kualitas udara Bekasi 3 jam terakhir pada saat data ini diambil sekitar tanggal

14/05/2024 pada pukul 08.00 hingga 11.00 WIB menunjukkan indikator PM 2.5 di Bekasi cenderung tidak sehat bagi kelompok sensitif. Konsentrasi PM2.5 udara Bekasi terendah berada di level 47,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pada pukul 10.00– 12.00 WIB pada tanggal 13/05/2024, sedangkan konsentrasi PM2.5 tertinggi pada pukul 08.00– 11.00 WIB pada tanggal 14/05/2024 dengan nilai 66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Hal tersebut ditunjukkan di dalam data yang didapatkan dari aplikasi IQ Air



Gambar 1.3 Skor PM2.5 Kota Bekasi Tertinggi

Sumber: Aplikasi IQ AIR



Gambar 1.4 Skor PM2.5 Kota Bekasi Terendah

Sumber: Aplikasi IQ AIR

Selain PM2.5, gas Nitrogen dioksida (NO_2) juga merupakan masalah serius dalam pencemaran udara karena dapat mengganggu sistem pernapasan dengan cara menurunkan fungsi paru-paru dan melemahkan sistem pernapasan. Hal ini akan

menjadi tantangan besar dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ketiga, yaitu mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan kualitas udara yang ada di sekitar Kota Bekasi

Tabel 1. 1 Perbandingan Kualitas Udara

Lokasi	Nilai Indeks Kualitas Udara
Jakarta	89 (Sedang)
Depok	151 (Tidak Sehat)
Bogor	96 (Sedang)
Kabupaten Bekasi	119 (Tidak Sehat Bagi Kelompok Sensitif)
Tangerang	137 (Tidak Sehat Bagi Kelompok Sensitif)
Kota Bekasi	165 (Tidak Sehat)

LEGENDA		
0-50	Bagus	Hijau
51-100	Sedang	Kuning
101-150	Tidak sehat bagi kelompok sensitif	Merah
151-200	Tidak sehat	Hitam

Sumber: Aplikasi IQ AIR

Pada tabel 1.1 di atas adalah data kualitas kesehatan udara di sekitar Kota Bekasi menurut aplikasi IQ AIR adapun daerah di sekitar Kota Bekasi seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Kabupaten Bekasi

Tabel 1. 2 Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bagumutu		Rataan	IKU
NO ₂ (μ/m ³)	SO ₂ (μ/m ³)	NO ₂ (μ/m ³)	SO ₂ (μ/m ³)		
24,49	16,49	0,61	0,82	0,72	65,65

Sumber: Hasil Pengujian Kualitas Udara Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara yang diperoleh dari situs resmi KLHK, nilai indeks kualitas udara sebesar 65,65 masuk ke dalam kategori “sedang”

Tingginya indikator PM2.5 mengancam kesehatan makhluk hidup. Berikut beberapa di antaranya:

- Dampak pada kesehatan antara lain terjadi iritasi pada saluran pernapasan, batuk, pilek, dan sesak napas. Hal ini menyebabkan efek jangka panjang yang menyebabkan penyakit jantung, koroner, stroke, paru-paru kronis, dan kematian.
- Dampak pada lingkungan menyebabkan kerusakan tanaman dan hutan sehingga dapat menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman; hujan asam dapat merusak bangunan, tanaman, dan air; adanya perubahan iklim yang dapat memerangkap panas di atmosfer.

Berdasarkan data yang ada, penelitian ini sangat penting dilakukan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Tujuannya untuk memperhatikan dan mempertahankan kadar udara di Kota Bekasi.

Penelitian ini berfokus pada Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Bekasi di Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 2 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda ini diterbitkan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengatur pengendalian pencemaran udara agar kualitas udara tetap terjaga. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi udara dalam mendukung kesehatan manusia serta melindungi keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, pencemaran udara di Kota Bekasi dapat terkontrol, namun kenyataannya sejak penerbitannya, dampak positif bagi

masyarakat belum terlihat. Pencemaran udara di Kota Bekasi justru semakin tinggi, yang berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada anak-anak dan lansia. Seharusnya, dengan adanya Perda ini, pencemaran udara bisa lebih terkendali.

Menurut penulis, pelaksanaan kebijakan ini masih kurang efektif, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini penting karena terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, di mana meskipun tujuan perda adalah untuk mengendalikan pencemaran udara, namun tingkat polusi udara di Kota ini justru menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hal ini, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014.

1.2 Perumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Tingginya skor harian terkait pencemaran udara di Kota Bekasi
2. Tingginya tingkat skor PM2.5 di Kota Bekasi
3. Banyaknya kendaraan bermotor yang tidak taat pada aturan dalam melakukan uji emisi, sehingga pencemaran udara melalui asap kendaraan bermotor sulit dikendalikan
4. Kurangnya kepekaan masyarakat dalam menjaga kesehatan udara

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, rumusan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tujuan kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pencapaian tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara berbasis tujuan kebijakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bekasi dalam menangani dan mengendalikan pencemaran udara di Kota Bekasi sehingga dapat meningkatkan indikator kesehatan udara yang lebih baik dari sebelumnya dan aman bagi seluruh masyarakat.

b. Manfaat Akademis

Dapat menjadi referensi bagi civitas akademik dan mampu mengkaji pelaksanaan kebijakan pengadilan pencemaran udara. Selain itu, dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti lain.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Ringkasan
1.	Mutia Alviena Sari (2021)	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori evaluasi dari Bridgman & Davis yang meliputi 4 indikator yaitu input, proses, output dan outcome	Dari beberapa wawancara dan observasi yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa kebijakan Pemerintah kota Dumai Dalam pengendalian pencemaran lingkungan memang berdampak positif bagi Lingkungan kota Dumai maupun masyarakatnya. Manfaat yang terpenting adalah untuk pengawasan terhadap aktifitas industri yang saat ini sudah berkurang pelanggaran berupa tumpahnya minyak maupun bercecernya limbah pabrik yang beroperasi. Kebijakan

					yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berdampak positif karena telah mengatasi permasalahan lingkungan, sehingga jumlah industri yang melakukan pelanggaran dalam beraktifitas berkurang
2.	Deshermansyah (2016)	Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Udara DKI Jakarta	Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai implementasi sebuah kebijakan sehingga diperoleh informasi apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan yang diharapkan.	Dunn (1999: 9), bahwa evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui empat aspek, yaitu: - Proses pembuatan Kebijakan - Proses implementasi kebijakan - Konsekuensi kebijakan - Efektivitas dampak kebijakan.	Impelementasi kebijakan Uji Emisi dan Kebisingan "sudah diimplementasikan", tapi kecenderungannya bila dilihat dari Jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi dan kebisingan 4(empat) tahun terakhir cenderung menurun. Impelementasi kebijakan Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk angkutan umum dan kendaraan opsional Pemerintah Daerah DKI Jakarta "belum diimplementasikan".

3.	Sulistya Rini Pratiwi (2016)	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara Di Kota Yogyakarta	Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data hasil penelitian yang berupa naratif dan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan deskripsi studi untuk menghasilkan data berupa fakta dari implementasi yang sesuai dengan kondisi permasalahan.	Dunn (1999: 9), bahwa evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui empat aspek, yaitu: - Proses pembuatan Kebijakan - Proses implementasi - Konsekuensi kebijakan - Efektivitas dampak kebijakan.	Dalam penelitian ini lebih menekankan pada penyebaran pencemar udara serta sebab musabab dari tercemarnya udara di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga memaparkan berbagai jenis polutan yang terkandung dalam udara di Kota Yogyakarta saat ini dan Pengaruhnya terhadap kesehatan manusia
4.	Sarah Ramadhani Putri, Samadi (2024)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Bekasi	Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data hasil penelitian yang berupa naratif dan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan deskripsi studi untuk menghasilkan data berupa fakta dari implementasi yang sesuai dengan kondisi permasalahan.	Ficher, J.Miller, & S.Sidney, 2007 tentang implementasi kebijakan secara luas didefinisikan sebagai "apa yang terjadi antara pembentukan niat yang jelas pada bagian dari pemerintah untuk melakukan sesuatu, atau	Penelitian ini berfokus pada studi pemetaan dan persebaran polusi udara perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mendapatkan hasil penelitiannya peneliti menggunakan teknik kriging yang dipetakan menjadi wilayah-wilayah yang

				berhenti melakukan sesuatu, dan dampak akhir dalam dunia tindakan"	memiliki konsentrasi karbondioksida di Kota Yogyakarta
5.	Rahmayanti, Henita	Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Dalam menangani Polusi Udara di Wilayah Perkotaan	Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data hasil penelitian yang berupa naratif dan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan deskripsi studi untuk menghasilkan data berupa fakta dari implementasi yang sesuai dengan kondisi permasalahan.	Dunn (1999: 9), bahwa evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui empat aspek, yaitu: Proses pembuatan Kebijakan, Proses implementasi, Konsekuensi kebijakan, Efektivitas dampak kebijakan.	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai transportasi di daerah perkotaan khususnya kota-kota metropolitan dan penanganan polusi udara yang ditimbulkan oleh kemacetan kendaraan, serta beberapa tujuan lain, yaitu mengetahui bagaimana kebijaksanaan pemerintah dalam menangani masalah kemacetan, mengetahui bagaimana kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi/mereduksi polusi udara yang ditimbulkan oleh kemacetan. Penelitian ini juga meneliti sebab akibat dari pencemaran yang telah terjadi.

6.	Arian Pramudi, Nadiroh, Samadi (2020)	Ketataan Pengelolaan Lingkungan Di Industri Dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara	Metode yang digunakan adalah penelitian kebijakan (<i>policy research</i>) dengan desain deskriptif yaitu memilah pasal-pasal atau ayat-ayat pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 yang berhubungan, mencari data implementasi dari pasal/ayat yang sudah dipilih sesuai dengan tujuan penelitian serta menganalisa data yang diperoleh dari observasi lapangan dan pengecekan dokumen	Ficher, J.Miller, & S.Sidney, 2007 tentang implementasi kebijakan secara luas didefinisikan sebagai "apa yang terjadi antara pembentukan niat yang jelas pada bagian dari pemerintah untuk melakukan sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu, dan dampak akhir dalam dunia tindakan"	Tekanan kualitas udara Kota Jakarta adalah pencemaran udara perkotaan yang bersumber dari empat kegiatan utama, yakni transportasi darat, pembangkitan listrik & pemanas, pembakaran domestik serta pembakaran industri. Emisi pencemaran udara oleh industri sangat tergantung dari jenis industri dan prosesnya, peralatan industri dan utilitasnya.
----	---	--	--	---	--

7.	Haimeng Liu, Chengxin Wang, Mi Zhang, Shaobin Wang	<i>Evaluating the effects of air pollution control policies in China using a difference-in-differences approach</i>	Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data hasil penelitian yang berupa naratif dan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan deskripsi studi untuk menghasilkan data berupa fakta dari implementasi yang sesuai dengan kondisi permasalahan.	<i>To test the effectiveness of the Autumn and Winter Action Plan, a difference-in-differences model (DID) with various air pollutants as the dependent variable was constructed. This method stems from the scientific tradition of comparing sample groups before and after experiments.</i>	Tulisan ini berisi tentang kebijakan pencemaran udara di Indonesia yang dapat dijadikan arah dan pegangan dalam mengoperasionalkan program dan menjabarkan Undang-undang untuk kepentingan berbagai pihak atau stakeholder. Kebijakan pencemaran udara di Indonesia telah dilakukan namun ruang lingkup terbatas pada pengendalian pencemaran udara di kota-kota besar dengan kawasan Industrinya. Dasar pengambilan kebijakan yaitu berupa undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah/presiden maupun menteri telah banyak diterbitkan namun tidak didukung dengan pengembangan tujuan dan sasaran global dari adanya pencemaran udara untuk
----	--	---	---	---	---

					melahirkan suatu kebijakan baru.
8.	Dr. Darmawansyah, SE, MS (2008)	Kebijakan Pencemaran Udara Di Indonesia	Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data hasil penelitian yang berupa naratif dan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan deskripsi studi untuk menghasilkan data berupa fakta dari implementasi yang sesuai dengan kondisi permasalahan.	William N. Dunn : Analisis Kebijakan (<i>Policy Analysis</i>)	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kesimpulan mendasar, yaitu perencanaan Program Langit Biru oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan pada tahun 2002. Pelaksanaan ini berorientasi pada penurunan emisi gas rumah kaca serta pembuangan gas karbondioksida. Upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan Program

					Langit Biru di Kota Yogyakarta ini belum terlaksana secara maksimal.
9.	Pudyatmoko, Sri (2016)	Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data hasil penelitian yang berupa naratif dan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan deskripsi studi untuk menghasilkan data berupa fakta dari implementasi yang sesuai dengan kondisi permasalahan.	William N. Dunn : Analisis Kebijakan (<i>Policy Analysis</i>)	Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat disimpulkan bahwa kondisi udara di Sleman dan Bantul masi tergolong baik, akan tetapi di Kota Yogyakarta sudah mulai adanya indikasi pencemaran udara dan akan semakin buruk
10.	Fitria, Layla (2009)	Program Langit Biru: Kontribusi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Kota Terhadap Penurunan Penyakit Pernapasan	Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data hasil penelitian yang berupa naratif dan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan deskripsi studi untuk menghasilkan data berupa fakta dari implementasi yang sesuai dengan kondisi permasalahan.	Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas	Program Langit Biru merupakan salah satu upaya mengurangi pencemaran udara dari sektor transportasi yang dirancang sejak tahun 1996. Hingga kini, kontribusi Program Langit Biru terhadap penurunan kasus gangguan pernapasan pada anak belum dapat diperkirakan, antara lain disebabkan oleh karena pelaksanaan program melalui

				yang mengandung zat di atas batas kewajaran (Oktora, 2008).	kegiatan riil yang baru terwujud beberapa tahun setelah direncanakan
11.	Wasif Raza, Bertil Forsberg, Christer Johansson & Johan Nilsson Sommar (2018)	<i>Air pollution as a risk factor in health impact assessments of a travel mode shift towards cycling</i>	Mengukur paparan polusi udara dan menyajikan hasil tentang dampak emisi kendaraan terhadap kesehatan akibat peralihan moda transportasi bermotor ke perjalanan aktif dan transportasi umum. Menggunakan penilaian risiko komparatif, analisis biaya manfaat, penilaian risiko, atau penilaian manfaat sebagai metodologi untuk penilaian dampak kesehatan. Mengukur dampak pada setidaknya satu hasil kesehatan.	Kaitan antara pembuatan kebijakan dan hasil lingkungan hidup adalah a situasi kompleks dengan kerangka waktu yang panjang, perbedaan geografis yang besar, dan banyak ketidakpastian (Henneman et al., 2017; Mickwitz, 2003).	Mengidentifikasi 18 studi tentang penilaian dampak kesehatan dari perubahan moda transportasi. Sebagian besar studi menyelidiki skenario hipotetis masa depan dari peningkatan bersepeda. Dampak pada populasi umum diperkirakan menggunakan pendekatan penilaian risiko komparatif di sebagian besar studi ini, sedangkan beberapa menggunakan estimasi biaya yang diterbitkan sebelumnya. Sebagian besar studi menggunakan fungsi respons paparan dari studi yang

					membandingkan tingkat latar belakang partikel halus antara kota-kota untuk memperkirakan dampak kesehatan dari emisi lalu lintas lokal. Dampak polusi udara yang terkait dengan peningkatan bersepeda memberikan manfaat kesehatan kecil bagi populasi umum, dan juga hanya sedikit meningkatkan risiko yang terkait dengan paparan partikel halus di antara mereka yang beralih ke bersepeda. Namun, studi yang menghitung dampak kesehatan berdasarkan fungsi respons paparan untuk ozon, karbon hitam atau nitrogen oksida menemukan efek yang lebih besar yang dikaitkan dengan perubahan paparan polusi udara.
--	--	--	--	--	--

12.	Kamal Jyoti Maji, Anil Kumar Dikshit & Ashok Deshpande (2016)	<i>Human health risk assessment due to air pollution in 10 urban cities in Maharashtra, India</i>	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian HHR, menggunakan perangkat lunak AirQ 2.2.3 (WHO,tahun 2004) yang dikembangkan oleh Pusat Kesehatan Lingkungan Eropa WHO, Divisi Bilthoven. Perangkat lunak ini mengadopsi model Ri-MAP yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperkirakan dampak potensial paparan polutan udara tertentu terhadap kesehatan orang yang tinggal di daerah perkotaan selama periode waktu tertentu. Penilaian HHR didasarkan pada konsep risiko yang dapat diatribusikan pada populasi (<i>population attributable risk</i> (PAR) (juga disebut “ <i>population attributable risk percentage</i> ”), yang didefinisikan sebagai fraksi dari tingkat kelebihan penyakit pada populasi tertentu	Kaitan antara pembuatan kebijakan dan hasil lingkungan hidup adalah a situasi kompleks dengan kerangka waktu yang panjang, perbedaan geografis yang besar, dan banyak ketidakpastian (Henneman et al., 2017; Mickwitz, 2003).	Studi ini mengkaji risiko kesehatan manusia di 10 kota di Maharashtra, India, dalam hal mortalitas dan morbiditas akibat tiga polutan kritis (yaitu PM ₁₀ , SO ₂ , dan NO ₂). Model risiko mortalitas/morbiditas akibat polusi udara (Ri-MAP) yang diadopsi dalam perangkat lunak penilaian dampak kesehatan kualitas udara (AirQ) digunakan untuk mengevaluasi dampak kesehatan langsung dari berbagai polutan udara kritis di berbagai kota di Maharashtra selama periode 2004–2013. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah kelebihan mortalitas dan morbiditas di Nagpur, Thane, Aurangabad, Kolhapur, dan Chandrapur menunjukkan tren peningkatan, sementara kota-kota seperti Mumbai dan Solapur menunjukkan tren
-----	--	---	---	---	---

					penurunan, dan kota-kota lain seperti Pune, Nashik, dan Navi-Mumbai berada dalam kondisi stabil. Kota-kota yang memiliki angka kelebihan rata-rata tahunan tertinggi dari total kematian
--	--	--	--	--	---

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penulisan peneliti saat ini adalah adanya perbedaan lokus yang diteliti serta melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap kebijakan yang sudah ada sebelumnya dan ada beberapa data yang memang belum diperbaharui.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Administrasi adalah sekumpulan aktivitas melalui formulasi kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengaturan, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan (Hardiansyah, 2012:12). Administrasi merupakan tugas yang dilakukan orang ataupun sekelompok orang melalui kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (2013:3). Sedangkan publik adalah sekumpulan manusia yang mempunyai kesamaan berpikir serta keputusan yang benar berdasarkan nilai yang dimiliki (Syafie, 2010:17). Publik merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kepentingan yang sama didalam sebuah organisasi (Mukarom, 2015:17).

Administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang berfokus pada perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Thoha, 2008:94). Menurut Wirman (2012:25), administrasi publik mencakup proses koordinasi dalam merancang dan menerapkan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan negara.

Ibrahim (2009:17) mendefinisikan administrasi publik sebagai penyelenggaraan birokrasi melalui pengelolaan pemerintahan dengan sistem kerja yang terstruktur serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sementara itu, Dwight Waldo (dalam Syafie, 2010:25) mendefinisikan sebagai proses mengelola sebuah organisasi untuk tujuan nasional.

Menurut Nigro dan Nigro (dalam Anggara, 2016:46), administrasi publik berkaitan dengan kerja sama dengan organisasi sektor publik yang terdiri dari yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Pasolong (2013:8) mendefinisikan administrasi publik sebagai upaya kerja sama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat diketahui bahwa administrasi publik adalah suatu ilmu yang mengatur dan mengelola organisasi pemerintahan serta penyelenggaraan birokrasi, yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien.

Administrasi publik tidak dapat melepaskan diri dari dampak perkembangan lingkungan, salah satunya akibat kemajuan teknologi. Administrasi publik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan paradigma yang dianutnya sehingga mampu mereformasi dirinya sejalan dengan paradigma good governance yang satu ini menjadi tuntutan masyarakat. Bicara mengenai paradigma, Tokoh yang terkenal dengan paradigma administrasi publiknya yaitu Nicholas Henry. Awalnya tahun 1970an Henry berpendapat bahwa ada 5 paradigma administrasi publik. Namun pada tahun 2018 Nicholas Henry merevisi bukunya dan memunculkan paradigma baru sehingga saat ini jumlahnya ada 6 paradigma (Muluk, 2020) :

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada paradigma pertama, kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat menjadi inti dalam ranah politik. Pemisahan antara politik dan administrasi

terlihat dari pembagian tugas, di mana badan legislatif berperan dalam mewakili kehendak rakyat, sementara badan eksekutif bertugas menjalankan keputusan tersebut.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937).

Pada ini administrasi publik berkonsentrasi pada penerapan prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan, koordinasi, pelaporan dan penganggaran.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Tahap ini menjelaskan bahwa administrasi publik menjadi bagian dari ilmu politik. Hal ini menyebabkan munculnya pandangan bahwa sebagian besar ilmu politik itu bagian dari administrasi publik. Namun, dalam era ini dianggap kehilangan identitasnya karena terlalu erat dengan ilmu politik.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada tahap keempat, prinsip-prinsip manajemen yang telah berkembang mulai diteliti dan diterapkan dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Dalam paradigma ini, terdapat dua arah utama dalam perkembangannya. Pertama, administrasi negara yang didasarkan pada berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi sosial. Kedua, administrasi yang lebih berfokus pada kebijakan publik.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-an)

Paradigma kelima menetapkan batasan yang jelas dalam teori administrasi negara, dengan menekankan teori organisasi, teori manajemen, serta

kebijakan publik. Sementara itu, fokus utama administrasi negara adalah pada persoalan-persoalan publik.

6. Paradigma Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990-sekarang)
Paradigma keenam menitikberatkan administrasi publik pada upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Tata pemerintahan yang demokratis harus diselenggarakan dengan prinsip transparansi, kebersihan, dan kewibawaan untuk mewujudkan *good governance*. Dalam paradigma ini, kekuasaan tidak hanya terpusat pada pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat sebagai pemegang kendali utama. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasarkan pada keseimbangan hubungan antara tiga elemen utama, yaitu masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, yang harus berjalan secara harmonis, selaras, serta seimbang.

Paradigma *New Public Management* (NPM) atau Manajemen Publik Baru, yang merupakan bagian dari paradigma administrasi publik kelima, menitikberatkan perhatian pada hasil dan kinerja kebijakan publik. Oleh karena itu, paradigma ini sangat berkaitan dengan tahap implementasi serta evaluasi kebijakan.

Dengan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, NPM mendorong pemerintahan untuk bekerja secara profesional dan terukur dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini dilakukan melalui penerapan metode seperti manajemen kinerja, kompetisi, serta desentralisasi dalam pengelolaan kebijakan publik. Saat ini, paradigma NPM menjadi salah satu pendekatan utama dalam

administrasi publik modern, terutama dalam upaya reformasi kebijakan serta pengelolaan sektor publik di berbagai negara.

1.5.2.2 Kebijakan Publik

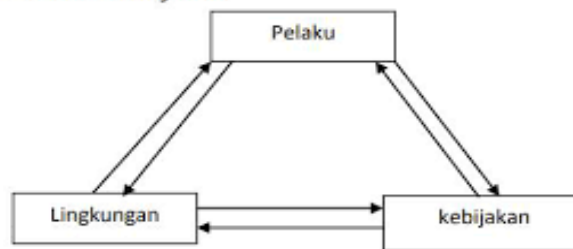
Dalam administrasi publik, diperlukan suatu dimensi yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat. Dimensi ini dikenal sebagai kebijakan publik, yang berfungsi untuk menganalisis proses munculnya masalah, penentuan solusi, implementasi kebijakan, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Dalam konteks administrasi negara, kebijakan publik menjadi instrumen utama untuk melayani kepentingan masyarakat dan merancang strategi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017:166), kebijakan dapat dipahami sebagai sekumpulan langkah strategis yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan harus dibuat untuk mengatasi masalah yang ada. Anderson dalam Agustino (2017:17) menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai tahapan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu atau kelompok terkait dengan permasalahan yang menjadi perhatian.

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai suatu sistem, yaitu kumpulan unsur yang saling berhubungan dan terorganisir dalam aturan tertentu untuk membentuk satu kesatuan. Dunn (1994) menjelaskan bahwa sistem kebijakan

(*policy system*) terdiri dari tiga elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu kebijakan publik itu sendiri, para pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Tiga elemen sistem kebijakan



Gambar 1.5 Segitiga Sistem Kebijakan

Sumber: Dunn dalam Ayuningtyas (2014: 15)

Segitiga sistem kebijakan menggambarkan hubungan antara aktor kebijakan yang berperan dalam proses kebijakan publik, di mana mereka tidak hanya memengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan. Selain itu, kebijakan publik juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga elemen ini membentuk suatu sistem kebijakan, yakni suatu tatanan kelembagaan yang menjalankan kebijakan publik dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial-politik, serta interaksi di antara unsur-unsur kebijakan tersebut.

William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) menyebutkan bahwa sistem dan komponen kebijakan publik sebagai berikut:

- Isi kebijakan adalah kumpulan keputusan yang dibuat pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan publik. Urusan yang dimaksudkan ini berupa pengambilan tindakan apapun. Adanya kebijakan ini dimaksudkan untuk menangani sejumlah masalah yang dihadapi oleh

masyarakat diberbagai bidang, seperti pertahanan, keamanan energi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

- Aktor atau pemangku kepentingan merupakan individu atau kelompok yang mempunyai keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan sehingga dapat memiliki kemungkinan untuk dipengaruhi atau terdampak oleh kebijakan tersebut.
- Lingkungan kebijakan (*policy environment*): Konteks di mana kebijakan itu diterapkan, yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh aktor kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

1.5.2.3 Tahapan Kebijakan Publik

Para ahli politik yang tertarik dalam studi kebijakan publik membagi proses perumusan kebijakan ke dalam beberapa tahap untuk mempermudah analisisnya, karena proses tersebut sangat kompleks dan melibatkan banyak variabel yang harus dianalisis oleh para pembuat kebijakan (Charles Lindblom, 1986, dalam Budi Winarno, 2004:32). Berikut ini adalah beberapa langkah dalam kebijakan publik yang disebutkan oleh William Dunn (2003):

1. Tahapan Penyusunan Agenda. Tahapan ini terdapat aktor yang memiliki wewenangan untuk merumuskan kebijakan dengan menentukan masalah apa yang menjadi bagian dari agenda publik. Hal ini dikarenakan terdapat persaingan antara masalah yang ingin mendapatkan prioritas tertinggi. Selain itu, agenda kebijakan tidak dapat mencakup semua masalah sehingga

beberapa masalah akhirnya dipilih untuk dibahas dan masalah lain mungkin ditunda untuk waktu yang belum ditentukan.

2. Tahapan Formulasi Kebijakan. Tahapan ini para pembuat kebijakan membahas permasalahan yang telah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada titik ini, masalah belum dijabarkan secara menyeluruh sebelum mencari solusi terbaiknya. Dalam proses ini, berbagai alternatif kebijakan dipertimbangkan untuk dipilih sebagai solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini berkaitan kepada setiap pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berusaha untuk menawarkan solusi terbaik dari mereka yang paling dianggap sesuai.
3. Tahapan Adopsi Kebijakan. Tahapan ini telah mencapai alternatif kebijakan yang telah ditetapkan. Keputusan ini biasanya didasarkan kepada dukungan mayoritas di lembaga legislatif melalui persetujuan antara pimpinan lembaga atau keputusan pengadilan.
4. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan berdampak jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, tahap ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan pemerintah dengan mengerahkan sumber daya manusia dan finansial. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan bisa menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan di antara para pelaksana, yang bisa mendukung atau bahkan menolak kebijakan tersebut.
5. Tahapan Evaluasi Kebijakan. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, dengan mengukur sejauh mana kebijakan

tersebut mampu mengatasi masalah yang menjadi tujuannya. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan apakah kebijakan tersebut telah memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan terkait tahapan kebijakan publik di atas, bahwa peran evaluasi kebijakan publik sangat penting dalam proses kebijakan. Solusi yang tepat dan sesuai diperlukan untuk menangani berbagai masalah yang muncul di lingkungan masyarakat.

1.5.2.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan, menurut Worthen dan Sanders (1973:19), merupakan proses penilaian terhadap suatu program, produk, prosedur, tujuan, atau manfaat potensial berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan serta mempertahankan pendekatan tertentu dalam implementasi kebijakan. Ernest House menekankan bahwa layanan evaluasi berfungsi sebagai penyedia informasi bagi para pembuat keputusan agar dapat menentukan alokasi sumber daya secara tepat. House juga menyoroti bahwa evaluasi tidak pernah sepenuhnya netral, karena evaluator harus memahami kebutuhan dan perspektif berbagai kelompok pemangku kepentingan, terutama mereka yang kurang berdaya (*poor and powerless*), serta menjaga keseimbangan informasi dalam konteks keadilan.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Tujuan dari evaluasi ini untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan suatu kebijakan dan menilai suatu kebijakan publik agar dapat

menghasilkan dampak yang diharapkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23). Oleh karena itu, fungsi dari evaluasi kebijakan ini adalah untuk menilai konsekuensi yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Keefektifan kebijakan ini diukur dari dampaknya, dan untuk menilai kebijakan dapat diukur dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63), evaluasi kebijakan pada dasarnya digunakan untuk mengukur jangkauan suatu kebijakan berhasil dilaksanakan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Briant & White menyatakan bahwa evaluasi dilakukan pada proses pelaksanaan kebijakan dengan menilai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan. Sementara itu, Rossi & Freeman berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk menjawab pertanyaan yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu konseptualisasi dan perancangan, implementasi, serta manfaat program.

Rossi & Freeman (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) juga menyatakan bahwa evaluasi suatu program harus didasarkan pada penetapan nilai yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aspek utama dalam evaluasi kebijakan adalah adanya tujuan dan kriteria yang menjadi dasar nilai dalam proses penilaian.

Tujuan atau *goals* merumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan, baik secara umum maupun dalam bentuk angka-angka konkret. Sementara itu, *criteria* memastikan bahwa tujuan tersebut ditetapkan terlebih dahulu agar dapat

tercapai dan terpenuhi. Dalam proses evaluasi, perbedaan maksud dan kriteria yang digunakan dapat menyebabkan suatu program dianggap gagal berdasarkan satu instrumen evaluasi, tetapi dinilai berhasil berdasarkan kriteria lainnya (Suharyanto, dalam Deka Budianto, 2006:15).

Menurut Samodra Wibawa (1994: 13-14), tujuan penilaian adalah untuk menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan, khususnya pembuat kebijakan, mengenai pelaksanaan sebuah program. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat disesuaikan agar hasil yang dicapai menjadi lebih optimal, serta menyediakan opsi kebijakan baru atau metode pelaksanaan yang berbeda. Mengikuti penjelasan yang telah diberikan tersebut, informasi yang diperoleh dari penilaian suatu kebijakan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program yang sedang dalam proses pelaksanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu disesuaikan. Hasil evaluasi juga memiliki peran penting dalam mencegah dampak negatif dari program terhadap masyarakat dan menentukan kelanjutan program di masa depan. Jika dalam penilaian menunjukkan perlunya perubahan dalam suatu program, pengambil keputusan harus meresponsnya dengan serius, mengembangkan gagasan baru untuk meningkatkan program, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan menghindari kegagalan.

Menurut William Dunn (2003), evaluasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya. Karakteristik tersebut terbagi menjadi empat aspek utama:

1. Berorientasi pada Nilai. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan manfaat sosial dari adanya kebijakan, bukan hanya mengumpulkan data terkait hasil yang diharapkan atau tidak terduga. Evaluasi juga berpengaruh kepada proses analisis terhadap tujuan dan sasaran.
2. Hubungan antara Fakta dan Nilai. Evaluasi mencakup pertimbangan pada aspek fakta dan nilai. Pada aspek nilai, digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai kinerja yang optimal. Hal ini dibutuhkan bukti nyata untuk menunjukkan hasil yang menjadi konsekuensi dari tindakan.
3. Orientasi pada masa kini dan masa lampau. Evaluasi mempunyai perbedaan dengan advokasi. Alasannya karena lebih menitikberatkan kepada hasil di masa lampau dan saat ini sehingga bukan hanya memperkirakan kondisi di masa depan. Evaluasi ini bersifat retrospektif, artinya dilakukan setelah suatu kebijakan telah diberlakukan. Namun rekomendasi bersifat prospektif, artinya untuk menyempurnakan kebijakan di masa mendatang.
4. Dualitas nilai. Nilai dalam evaluasi mempunyai dua peran, yaitu sebagai tujuan dan alat untuk mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai dasar kebijakan dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan. Nilai ini bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Dalam penerapannya, nilai ini disusun dalam suatu hierarki yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif, serta hubungan antara tujuan dan sasaran kebijakan.

Dari berbagai teori yang dikemukakan, konsep evaluasi kebijakan menurut William Dunn menjadi acuan yang paling sesuai dalam menilai implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi. Hal ini karena pendekatan Dunn tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga mengevaluasi kinerja kebijakan di masa lalu, masa kini, dan implikasinya di masa depan. Selain itu, evaluasi menurut Dunn menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan apakah tindakan yang diambil telah menghasilkan dampak yang diinginkan bagi individu, kelompok, dan masyarakat luas.

Indikator Evaluasi Kebijakan Publik menurut William Dunn (2003) meliputi enam aspek utama sebagai berikut:

- Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tujuan tertentu dapat dicapai dengan mempertimbangkan hasil dan upaya yang dilakukan. Semakin besar pencapaian tujuan organisasi, semakin besar pula hasil yang diperoleh.
- Kecukupan berhubungan dengan sejauh mana tujuan yang dicapai sudah dianggap memadai dalam berbagai aspek. Kecukupan berkaitan dengan tingkat efektivitas suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang ada.
- Efisiensi menggambarkan hubungan antara efektivitas dan upaya yang dilakukan, yang umumnya diukur dari segi biaya. Efisiensi sering kali dihitung berdasarkan biaya per unit dari produk atau layanan yang dihasilkan.

- Pemerataan mencerminkan keadilan dalam distribusi manfaat dan biaya dari suatu kebijakan. Sebuah program dapat dikatakan efektif, efisien, dan memadai jika manfaat serta biayanya tersebar secara merata.
- Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.
- Ketepatan menilai kesesuaian antara nilai-nilai yang mendasari suatu program dengan tujuan yang ingin dicapai serta asumsi yang melandasinya.

Evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Evaluasi diperlukan karena memiliki beberapa fungsi utama, sebagaimana diungkapkan oleh William Dunn (2003) dalam analisis kebijakannya:

1. Menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang efektivitas kebijakan. Tujuannya untuk menilai sejauh mana kebutuhan, nilai dan peluang yang ada melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan untuk pencapaian tujuan dan menyelesaikan permasalahan.
2. Memperjelas serta mengkritisi nilai yang melandasi perumusan tujuan dan sasaran kebijakan publik. Dengan mendefinisikan dan mengoperasionalkan tujuan serta sasaran kebijakan, evaluasi berguna untuk membantu kebijakan yang ditetapkan itu dapat selaras.
3. Memfasilitasi penerapan model analisis kebijakan. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan rekomendasi atau solusi, meninjau kebijakan yang ada, dan mengembangkan alternatif kebijakan.

Fokus dari evaluasi ini terletak pada sejauh mana tujuan suatu program, produk, produk, atau proses telah tercapai. Metode yang digunakan dalam studi berbasis tujuan pada dasarnya melibatkan menentukan tujuan operasional dan mengumpulkan dan menganalisis informasi menganalisis informasi terkait terkait untuk menentukan seberapa baik setiap tujuan tercapai.

1.5.2.5 Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah digunakan sebagai penilaian efektivitas dan efisiensi suatu rencana, program, atau kebijakan. Evaluasi juga berguna dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu proyek, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyoroti kelebihan dan kekurangan yang ada. Selain itu, evaluasi memungkinkan pengukuran hasil dari implementasi suatu rencana, program, atau kebijakan secara objektif, dengan standar yang dapat diterima oleh semua pihak. Hasil evaluasi ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perencanaan selanjutnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Dunn (2003), terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- Pembandingan antara tujuan awal kebijakan dengan kondisi riil di lapangan dalam suatu kebijakan.
- Hasil dari kebijakan dianalisis untuk melihat keterkaitan antara sumber daya yang digunakan. Contohnya, membandingkan kondisi kualitas udara yang telah diatur dalam kebijakan dengan kualitas udara yang belum mendapatkan regulasi.
- Perubahan dari pelaksanaan suatu program dapat dievaluasi secara berkala.

1.5.2.6 Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan peningkatan jumlah zat atau unsur fisik dan kimia di dalam atmosfer yang melebihi batas normal, sehingga dapat terdeteksi oleh manusia baik secara langsung maupun melalui pengukuran, serta berpotensi menimbulkan dampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda material. Definisi lain dari pencemaran udara adalah adanya zat pencemar di atmosfer akibat aktivitas manusia (*man-made*). Selain itu, pencemaran udara juga dapat diartikan sebagai perubahan komposisi atmosfer akibat masuknya zat pencemar, baik yang berasal dari sumber alami maupun buatan (Mukono, 2011).

Pencemaran udara biasanya terjadi di daerah perkotaan dan kawasan industri yang padat, di mana gas yang dihasilkan mengandung zat melebihi ambang batas normal. Ini terjadi ketika kualitas udara menurun dan terkontaminasi oleh berbagai zat yang tidak berbahaya maupun berbahaya bagi kesehatan manusia. (Oktora, 2008).

Ada berbagai cara untuk mencegah pencemaran udara, yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langkah-langkah ini dilakukan secara teratur dan sistematis untuk menghindari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Upaya tersebut mencakup tahap perencanaan hingga penegakan hukum (Benedí C. & Güemes J. dan Sumarno, 2009). Menurut BPLH DKI Jakarta (2013), pencemaran udara terjadi akibat masuknya gas atau partikel kecil pencemar (aerosol) ke dalam atmosfer dalam

jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama, yang dapat mengganggu kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan (Ismiyati, Marlita, dan Saidah, 2014).

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran Udara sebagai proses masuknya zat ke dalam udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sehingga kualitas udara menurun dan tidak lagi memenuhi fungsinya (Government, 1999). Menurut Soedomo (dalam Cahyono, 2016), pencemaran udara terjadi ketika zat pencemar memasuki atmosfer dalam jumlah yang berlebihan, yang menyebabkan penurunan kualitas udara. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia. Pencemaran udara yang disebabkan oleh faktor alam contohnya letusan gunung berapi, sedangkan pencemaran yang berasal dari faktor manusia itu dari transportasi dan industri. (Pohan, 2002).

Menurut Canter (dalam Winata, 2020), pencemaran udara terjadi ketika zat pencemar hadir secara berlebihan di atmosfer dan bertahan dalam jangka waktu lama, sehingga berdampak negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan, serta material lainnya, sekaligus mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas.

Terdapat dua jenis pencemaran udara yaitu pencemar primer dan sekunder. Pencemar primer dihasilkan langsung dari sumber polusi, seperti karbondioksida yang muncul akibat pembakaran. Sementara pencemar sekunder terbentuk karena adanya reaksi kimia antara pencemar primer yang telah ada di atmosfer (Siburian, 2020). Karbon monoksida bisa terbentuk secara alami dari lautan, oksidasi logam, pegunungan, kebakaran hutan, dan badai listrik. Selain itu, karbon monoksida juga

dihasilkan dari aktivitas manusia, terutama dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Gas karbon monoksida berasal dari proses pembakaran yang tidak sempurna pada bahan bakar minyak (BBM), seperti bensin, di mana mesin kendaraan menghasilkan emisi yang mengandung zat berbahaya akibat proses pembakaran yang tidak optimal.

1.5.2.7 Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara

Menurut Edwards III, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1 Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Salah satu tantangan utamanya adalah lemahnya pelaksanaan yang biasanya dipengaruhi oleh komunikasi. Hambatan ini tidak hanya muncul saat kebijakan diimplementasikan tetapi juga sejak tahap perumusannya. Keberhasilan komunikasi dalam kebijakan publik dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu: transmisi (penyampaian informasi kebijakan dengan baik), kejelasan (informasi yang diterima tidak menimbulkan ambiguitas), dan konsistensi (informasi tidak berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan kebingungan).

2 Sumber Daya

Menurut Edwards III dalam Anggara (2014:250), pelaksanaan kebijakan memerlukan sumber daya yang mencakup:

- Staf merupakan tenaga kerja yang mempunyai jumlah serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Informasi mencakup paduan mengenai pelaksanaan kebijakan dan didukung dengan data yang relevan dari sebuah kebijakan.
- Kewenangan, yaitu hak yang diberikan kepada pelaksana kebijakan yang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Kewenangan ini dapat berupa membawa kasus ke pengadilan, menyediakan barang dan jasa, memperoleh serta mengelola dana, hingga menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya.
- Fasilitas, yaitu fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Fasilitas ini beragam tergantung pada jenis kebijakan yang dijalankan dan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas implementasi. Tanpa fasilitas yang memadai, kebijakan sulit dijalankan dengan optimal.

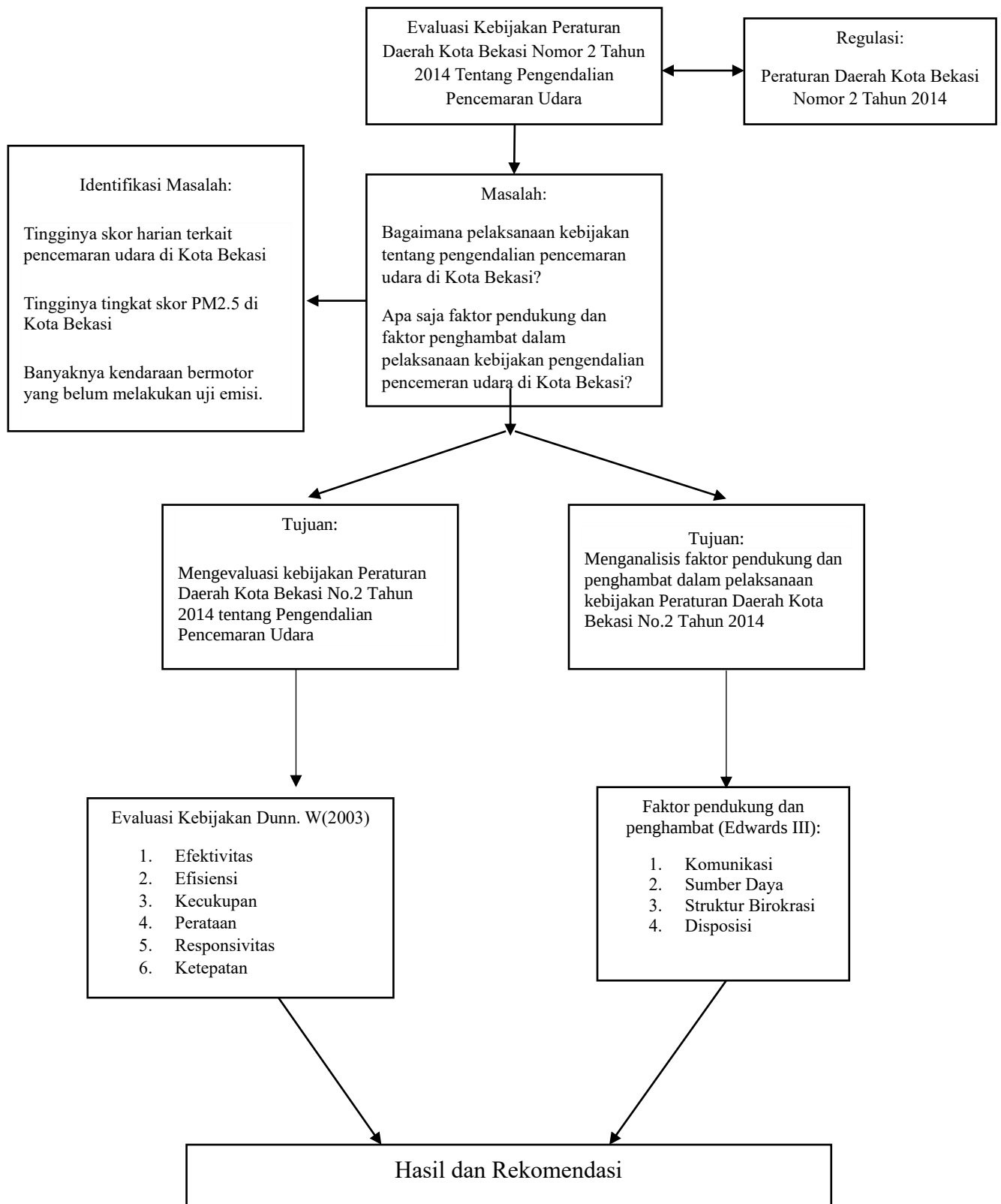
3 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan sistem kerja yang dirancang untuk mengelola pelaksanaan kebijakan. Edwards III menekankan bahwa *Standar Operational Procedure* (SOP) mempunyai peranan penting untuk mengatur alur kerja para pelaksana kebijakan. Adanya SOP membantu memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4 Disposisi

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan adalah sikap para pelaksana. Jika mereka menyetujui isi kebijakan, maka implementasi akan berjalan dengan baik dan penuh semangat. Namun, apabila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses pelaksanaan akan menghadapi berbagai kendala. Terdapat tiga bentuk sikap atau respons implementor terhadap kebijakan, yaitu kesadaran dalam melaksanakan kebijakan, arahan atau petunjuk dalam menanggapi program baik menerima maupun menolak, serta tingkat intensitas dari respons tersebut. Meskipun para pelaksana memahami tujuan program, mereka sering kali gagal dalam menjalankannya dengan baik karena tidak sepenuhnya setuju dengan tujuan yang ada, sehingga secara diam-diam menghindari atau mengalihkan implementasi. Selain itu, dukungan dari pejabat pelaksana sangat diperlukan agar sasaran program dapat tercapai.

1.5.3 Kerangka Pikir Penelitian



1.6 Operasionalisasi Konsep

Definisi operasional menurut Sugiyono (2012) menjelaskan metode tertentu yang digunakan untuk penulisan dan penerapan konstruk, sehingga memungkinkan pengukuran yang dapat direplikasi dengan cara yang sama atau mengembangkan metode pengukuran yang efektif.

Konsep operasional merupakan penjabaran lebih lanjut dari fenomena yang diteliti dan dikategorikan ke dalam variabel penelitian. Konsep ini berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang diteliti serta menghindari kesalahan dalam pemahaman konsep penelitian. Dengan mendefinisikan konsep operasional secara jelas, akan mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi menjadi bagian proses untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan adalah strategi yang dirancang dan diterapkan oleh perseorangan, kumpulan, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan, dengan menavigasi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang tersedia guna mewujudkan hasil yang diinginkan.
3. Pencemaran udara yaitu menurunnya kualitas udara akibat terkontaminasi oleh zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan makhluk hidup.

Evaluasi kebijakan pengendalian pencemaran udara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kualitas udara yang sehat di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. Dapat dilihat dari gejala:

1. Tujuan Kebijakan.

Tujuan adanya Peraturan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengendalian pencemaran udara, peningkatan kualitas hidup, menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif pencemaran udara yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan.
- b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas lingkungan udara agar tetap bersih dan sehat untuk dihuni
- c. Terkendalinya sumber-sumber pencemar, baik dari industri, kendaraan bermotor maupun aktivitas lain nya yang dapat berkontribusi terhadap pencemaran udara
- d. Penerapan kualitas udara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas udara dapat terjaga.

2. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan adalah ukuran sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa baik kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Ini termasuk analisis apakah

kebijakan tersebut memecahkan masalah yang ingin diatasi dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Fenomena yang diamati adalah penurunan pencemaran udara sesuai dengan yang sudah direncanakan.

3. Efisiensi.

Efisiensi dalam pengendalian pencemaran udara adalah keberhasilan strategi pengelolaan kualitas udara. Kebijakan yang mencapai hasil paling efektif dengan biaya paling rendah disebut efisien. Fenomena yang diamati adalah sumber daya yang dipergunakan dalam melaksanakan kebijakan dan komunikasi yang terjalin pada kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi

4. Kecukupan.

Kecukupan merupakan tingkat pemenuhan kebutuhan sudah maksimal. Fenomena yang diamati adalah sumber daya dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi secara maksimal.

5. Perataan.

Perataan merupakan penilaian secara adil sesuai dengan fungsi dan tujuan serta merata pada aspek yang dipengaruhi. Fenomena yang diamati adalah bagaimana koordinasi lembaga, partisipasi masyarakat, dan penegak hukum dan keadilan yang merata dari kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi.

6. Responsivitas

Responsivitas merupakan tanggapan atau pendapat atas penilaian kebijakan yang diterapkan pada suatu kebijakan. Fenomena yang diamati adalah menanggapi

keluhan masyarakat dan respon pelaksana terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi.

7. Ketepatan

Ketepatan merujuk kepada sejauh mana tujuan suatu program mencerminkan nilai yang diinginkan. Dalam konteks ini, fenomena yang diamati adalah penurunan indeks kualitas udara dan upaya pengurangan kadar polutan sesuai dengan tujuan kebijakan. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pada perda ini menurut Edwards III:

1. Sumber Daya mencakup tenaga manusia, fasilitas pendukung dan pendanaan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian mengenai permasalahan polusi udara di Kota Bekasi. Fenomena yang diamati meliputi:
 - a. Sumber daya manusia yang dievaluasi berdasarkan jumlah anggota dan pengurus yang terlibat dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang yang mencakup ketersediaan fasilitas untuk menjaga kualitas udara yang lebih sehat di Kota Bekasi. Hal ini mencakup keberadaan implementasi *Air Quality Monitoring System* dalam mendukung pengawasan kualitas udara.
 - c. Sumber dana adalah ada atau tidaknya dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah guna mendukung penuh kegiatan dalam mengendalikan pencemaran udara di Kota Bekasi. (terdapat atau

tidak bantuan dana atau anggaran untuk penngendalian pencemaran udara).

2. Komunikasi pada penelitian ini mengacu pada bagaimana cara pemangku kebijakan untuk memberi arahan, bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghindari perbedaan pendapat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan tujuan. Dengan gejala yang akan diteliti:
 - a. Transmisi adalah cara dinas mengendalikan pencemaran udara agar tercipta nya kualitas udara di Kota Bekasi yang sehat
 - b. Kejelasan, pada penelitian ini mengarah kepada sesuatu yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan kebijakan tersebut
 - c. Konsistensi, pada penelitian ini adalah cara dinas mengendalikan tingkat pencemaran udara di Kota Bekasi.
3. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi merupakan bentuk pembagian tanggung jawab dan tupoksi kerja yang disusun secara hierarki dari atas ke paling bawah. Fenomena yang diamati adalah kesesuaian pembagian tupoksi antar pegawai dan *stakeholders* terkait pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi

Tabel 1. 4 Tabel Fenomena

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Narasumber
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Tujuan Kebijakan PERDA No 2 Tahun 2014 adalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengendalian pencemaran udara, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat	- Terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran udara - Terjaganya kualitas lingkungan hidup, khususnya lingkungan udara - Terkendalinya sumber pencemar baik dari industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain	Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup
	Efektivitas adalah ukuran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa baik kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan	- Sasaran kebijakan pengendalian pencemaran udara - Pencapaian tujuan kebijakan pengendalian pencemaran udara	
	Efisiensi adalah strategi untuk mencapai efektivitas yang tinggi tetapi dengan biaya yang kecil	- Sumber daya yang dipergunakan dalam pelaksanaan kebijakan - Komunikasi yang terjalin pada kebijakan pengendalian pencemaran udara	

	Kecukupan adalah aspek tingkat pemenuhan kebutuhan sudah maksimal dan berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan	- Sumber daya dalam melaksanakan program pengendalian pencemaran udara	
	Perataan adalah penilaian secara adil sesuai dengan fungsi dan tujuan serta merata pada aspek yang dipengaruhi	- Koordinasi lembaga, partisipasi masyarakat, dan penegak hukum - Kesetaraan akses dengan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan sumber daya untuk mengurangi pencemaran	
	Responsivitas adalah tanggapan atas penilaian kebijakan yang diterapkan pada suatu kebijakan	- Menanggapi keluhan masyarakat - Respon pelaksana terhadap keluhan yang disampaikan	
	Ketepatan adalah nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut	- Penurunan tingkat pencemaran udara sesuai dengan tujuan kebijakan - Membuat lingkungan udara yang sehat sesuai dengan tujuan kebijakan - Mengendalikan sumber pencemaran sesuai tujuan kebijakan	

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara	Sumber daya adalah sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, pendukung , dan sumber dana dalam terselenggaranya pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara	- Penanganan pencemaran udara dilihat dari jumlah anggota dan pengurus pengendalian pencemaran udara - Terdapat alat pemantau kualitas udara dan bagaimana alat tersebut - Terdapat atau tidak bantuan dana atau anggaran dalam mengendalikan pencemaran udara	
	Komunikasi adalah cara dinas memberi arahan agar menghindari perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara	- Transmisi cara Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat mengendalikan pencemaran udara - Melakukan koordinasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> terkait untuk melihat ada atau tidak nya <i>miss communication</i>	
	Struktur birokrasi adalah bentuk pembagian tanggung jawab dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kerja yang disusun dari atas ke paling bawah	- Pembagian tupoksi antar pegawai dan <i>stakeholders</i> terkait pengendalian pencemaran udara	

INTERVIEW GUIDE

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Tabel 1. 5 Interview Guide

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Pertanyaan	Indikator
Evaluasi Kebijakan	Tujuan Kebijakan	- Melindungi kesehatan masyarakat - Terjaganya kualitas lingkungan hidup - Terkendalinya sumber-sumber pencemar	1. Apa yang menjadi permasalahan pengendalian pencemaran udara dalam mewujudkan dan melindungi kesehatan masyarakat? 2. Apa yang menjadi permasalahan pengendalian pencemaran udara untuk menjaga kualitas lingkungan hidup? 3. Apa yang menjadi permasalahan pengendalian pencemaran udara dalam mengendalikan sumber-sumber pencemar?	Apakah kebijakan tersebut dijalankan sudah sesuai dengan tujuan nya
	Efektifitas	- Pengurangan pencemaran udara sesuai dengan yang sudah direncanakan	4. Apa saja faktor yang menurut anda berkontribusi pada efektivitas atau inefektivitas dalam kebijakan ini? 5. Sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan aslinya yaitu pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi? 6. Bukti apa yang dimiliki oleh responden untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai efektif?	Sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan

	Perataan	- Koordinasi lembaga, partisipasi masyarakat, dan penegak hukum.	7. Apakah ada kelompok yang secara tidak proporsional diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan ini? 8. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat kebijakan ini didistribusikan secara lebih adil? 9. Bagaimana skema kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung pengendalian pencemaran udara?	Apakah manfaat kebijakan didistribusikan secara adil di antara semua kelompok yang ditargetkan
	Responsivitas	- Menanggapi keluhan masyarakat dan respon pelaksana terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi.	10. Apakah proses pembuatan kebijakan ini melibatkan partisipasi masyarakat? 11. Sejauh mana kebijakan ini responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat yang ditargetkan?	Apakah kebijakan responsif terhadap kebutuhan, keluhan dan preferensi masyarakat
	Ketepatan	- Penurunan indeks kualitas udara dan menurunkan kadar polutan sesuai dengan tujuan dari kebijakan.	12. Apakah kebijakan ini diterapkan sesuai dengan tujuannya? 13. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara lebih tepat? 14. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini? 15. Apakah penurunan tingkat pencemaran tercapai sesuai dengan tujuan dari kebijakan?	Apakah kebijakan diterapkan secara tepat dan sesuai dengan tujuannya

	Efisiensi	- Sumber daya yang dipergunakan dalam melaksanakan kebijakan dan komunikasi yang terjaln pada kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi	16. Apakah kebijakan ini telah dilaksanakan dengan cara yang hemat sumber daya? 17. Apa saja cara dinas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan ini?	Apakah kebijakan mencapai tujuannya dengan cara yang hemat sumber daya
	Kecukupan	- Sumber daya dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara di Kota Bekasi secara maksimal.	18. Apakah kebijakan ini memenuhi kebutuhan semua kelompok yang ditargetkan? 19. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memenuhi kebutuhan semua kelompok yang ditargetkan? 20. Apakah sumber daya yang ada sudah maksimal? 21. Bagaimana cara dinas memaksimalkan sumber daya untuk mengendalikan pencemaran udara?	Apakah kebijakan memenuhi kebutuhan semua kelompok yang ditargetkan
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara	Sumber Daya	- Sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran udara - Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan pengendalian pencemaran udara - Sumber dana	22. Berapa jumlah pengurus pengendalian pencemaran udara? 23. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas dalam mewujudkan udara yang sehat? 24. Bagaimana kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas? 25. Apakah terdapat pengecekan rutin kualitas (<i>Quality Control</i>) terhadap segala alat yang dimiliki?	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dalam suatu program

			26. Bagaimana alokasi dana yang dilakukan dalam mengendalikan pencemaran udara?	
	Komunikasi	- Transimisi - Kejelasan - Konsistensi	27. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari perbedaan pendapat antara pelaksana kebijakan dan pengaruh kebijakan? 28. Apakah pernah terjadi miss communication dalam pelaksanaan kebijakan ini? 29. Bagaimana cara dinas agar tetap konsisten dalam menyalurkan informasi kepada pihak-pihak yang menghasilkan sumber pencemar? 30. Apakah dinas mendapat arahan dari kelurahan/kecamatan terkait pengendalian pencemaran udara?	Alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas proses komunikasi dalam suatu program
	Struktur Birokrasi	- Pembagian tupoksi antar pegawai dan <i>stakeholders</i>	31. Apakah terdapat pembagian tupoksi (Tugas Pokok, dan Fungsi) dalam melaksanakan kebijakan ini? 32. Bagaimana pembagian tupoksi antar pegawai dan <i>stakeholders</i> dalam menjalankan kebijakan ini? 33. Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan ini?	Alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan

Sumber: Diolah Penulis, 2024

1.7 Argumen Penelitian

Saya mengambil judul ini dikarenakan terdapat isu atau masalah bahwa Kota Bekasi menjadi wilayah kota dengan kualitas udara yang buruk, hampir setiap hari bahkan setiap jam kualitas udara di kota ini selalu diatas skor yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), hal tersebut membuat permasalahan pencemaran udara di Kota Bekasi semakin kompleks dan perlu evaluasi terkait kebijakan yang sudah ada. Permasalahan yang paling utama adalah kualitas udaranya, kualitas udara di Kota Bekasi tidak baik bagi penderita masalah kesehatan pernapasan. Peluncuran kendaraan listrik pun sudah banyak yang bisa kita lihat di Kota Bekasi, seharusnya dengan mulai banyaknya masyarakat yang beralih dari kendaraan bermotor memakai BBM (Bahan Bakar Minyak) ke kendaraan bermotor yang menggunakan listrik membuat berkurangnya komponen udara kotor yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan, tetapi pada kenyataan nya kehadiran kendaraan listrik kualitas udara di Kota Bekasi tidak mengalami perubahan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, artinya tidak menggunakan angka statistik untuk menjelaskan dan menentukan masalah di dalam hasil pembahasan. Mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan situasi yang terjadi adalah tujuan pendekatan deskriptif.

Menurut Bogman dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan penelitian yang mengamati perilaku, wawancara, dan tulisan untuk menghasilkan data deskriptif. Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmu sosial yang memperhatikan manusia dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang berarti pendekatan yang menjelaskan kondisi subjek atau objek penelitian untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah.

Menurut Nazir (1988: 63) dalam *Buku Contoh Metode Penelitian*, metode deskriptif bertujuan untuk meneliti kondisi aktual dari suatu kelompok, objek, sistem pemikiran, atau peristiwa. Pendekatan ini digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik serta hubungan antarfenomena yang diamati. Sementara itu, Sugiyono (2005: 21) menjelaskan bahwa metode deskriptif berfungsi untuk menganalisis serta menginterpretasikan data penelitian tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang lebih luas atau menggeneralisasi temuan.

Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif merupakan pencarian informasi aktual dan terdapat interpretasi yang tepat. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung di masa kini, atau permasalahan yang bersifat aktual.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian berada di Kota Bekasi. Lokasi penelitian ini difokuskan pada Jalan H. Djaini, RT.007/RW.001, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17116

1.8.3 Subjek Penelitian

Informan yang terlibat pada penelitian ini antara lain:

- a. Masyarakat Kota Bekasi yang bekerja langsung di luar ruangan berjumlah 2 orang
- b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
- d. Staff Puskesmas Kota Bekasi yang berjumlah 1 orang

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang merupakan data dalam bentuk non-numerik atau bukan angka. Data kualitatif umumnya berisi analisis mengenai kondisi terkini dalam suatu organisasi, sehingga membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan menentukan permasalahan yang diteliti. Contoh data kualitatif meliputi hasil wawancara, observasi, serta catatan terkait permasalahan yang pernah terjadi, dan berbagai sumber informasi lainnya.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan, termasuk perwakilan dari Puskesmas Kota Bekasi dan masyarakat yang dipilih secara acak. Informasi dari masyarakat dan Puskesmas Kota Bekasi kemudian dibandingkan dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang dianggap sebagai informan utama atau sumber pembuatan data utama. Data sekunder diperoleh setelah mendapatkan

informasi dan dapat mendukung data sekunder. Data sekunder berupa foto, survey lapangan, dan lain-lain.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini memakai metode *purposive sampling*. Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*, yang menurut Dana P. Turner (2020), adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti telah menentukan individu dengan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena individu tersebut dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Keunggulan dari *purposive sampling* adalah efisiensi waktu yang lebih tinggi, namun kelemahannya adalah kemungkinan sampel yang dipilih tidak sepenuhnya mewakili populasi secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan pengamatan. Teknik yang digunakan yaitu:

1. Observasi/Pengamatan

Observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data mengenai pencemaran udara di Kota Bekasi akibat asap kendaraan bermotor. Proses ini mencakup pengamatan secara langsung serta pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan kepada

informan sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai dampak kebijakan pengendalian polusi udara terhadap pencemaran udara.

3. Dokumentasi

Tujuan dokumentasi adalah menghimpun data dalam berbagai bentuk seperti catatan, transkrip, agenda, serta dokumen lain yang relevan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai pencemaran udara di Kota Bekasi, serta arsip atau buku yang mendukung penelitian. Data dari dokumentasi kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Sumber dokumen berasal dari instansi terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak selalu dilakukan saat data dikumpulkan, tetapi juga setelah data dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti secara langsung menganalisis jawaban responden selama wawancara. Jika hasil analisis tidak memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Tahap yang sangat penting dalam penelitian adalah analisis data, di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menghasilkan kesimpulan. Metode analisis model Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:91), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan sepanjang waktu

hingga data mencapai titik kejenuhan. Proses analisis data setelah pengumpulan termasuk:

- 1 Kondensasi Data (*Data Condensation*) merupakan proses seleksi, simplifikasi, dan pengumpulan data berdasarkan kondisi lapangan wawancara dokumen lainnya. Tahapan ini dapat mengorganisasikan hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- 2 Penyajian Data (*Data Display*). Tahapan ini merupakan tahapan penyampaian data, di dalam data kualitatif disajikan berbagai bentuk termasuk ringkasan singkat, diagram, atau kategori lain. Namun yang paling umum, penyajian data berbentuk naratif. Tujuan pada tahapan ini untuk membuat fenomena yang diteliti agar dapat mudah dipahami dan dicari solusi dari tindakan sesuai dengan informasi yang didapatkan.
- 3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Pada tahapan ini terjadi penarikan kesimpulan. Namun kesimpulan masih bersifat sementara karena dapat menjadi pengumpulan data berikutnya dan dapat berubah di masa yang akan datang.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data yang dikumpulkan untuk penelitian sangat bergantung pada instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang menghasilkan informasi yang akurat. Validitas adalah alat instrumen yang digunakan untuk menilai kebenaran penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat digunakan untuk referensi dalam

proses pengukuran data. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka data yang dihasilkan tidak memberikan manfaat bagi peneliti karena tidak dapat digunakan untuk mengukur elemen yang seharusnya menjadi patokan untuk diukur. Jika laporan data konsisten dengan temuan peneliti, data dikatakan valid. Validitas data dalam penelitian kualitatif mengacu pada tingkat ketepatan antara data yang dikumpulkan oleh subjek penelitian dan data yang disampaikan oleh peneliti.

Menurut Creswell dan Miller (2010), validitas penelitian bergantung pada seberapa akurat hasilnya dianggap oleh peneliti, partisipan, atau pembaca secara keseluruhan. Validitas terdiri dari dua jenis. Pertama validitas internal yang mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat mencerminkan objek yang diukur. Kedua, validitas eksternal mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat ditetapkan pada berbagai penelitian yang berbeda.

Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keandalan suatu alat ukur dalam mengukur suatu objek. Jika suatu instrumen digunakan berulang kali untuk mengukur fenomena yang sama dan menghasilkan data yang konsisten, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat memberikan hasil yang tetap dalam pengukuran fenomena yang sama.

Susan Stainback (1998) mengemukakan bahwa reliabilitas sering didefinisikan sebagai konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dari perspektif positivistik, reliabilitas biasanya dianggap identik dengan konsistensi data yang dihasilkan oleh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda atau dengan

membagi set data menjadi dua bagian. Dalam penelitian kualitatif, data dianggap reliabel jika kondisi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen utama, maka pendekatan ini lebih bersifat subjektif dan reflektif.

Dalam konteks penelitian kualitatif, reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu pengukuran tetap konsisten meskipun diuji berulang kali pada subjek yang sama dan dalam kondisi yang serupa. Suatu penelitian dikatakan andal jika memberikan hasil yang konsisten dalam pengukuran yang sama. Baik validitas maupun reliabilitas berfokus pada kualitas data serta ketepatan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Karena suatu fenomena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sulit untuk menemukan dua fenomena yang benar-benar identik. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, realitas bersifat majemuk, dinamis, dan dapat berubah sehingga data yang dihasilkan tidak selalu konsisten atau dapat diulang dengan hasil yang sama persis. Dengan demikian, laporan penelitian kualitatif bersifat individualistik dan hasilnya akan bervariasi antar peneliti.

Setiap peneliti memiliki gaya bahasa dan pola pikir yang unik, sehingga cara mereka menyusun laporan pun berbeda satu sama lain menurut Paul Feyerabend (dalam teori anarkisme metodologis).

1. Uji Kredibilitas dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk validitas yang digunakan untuk memastikan tingkat kepercayaan data. Data dikatakan

kredibel jika terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan perspektif informan, narasumber, atau partisipan dalam penelitian.

a) Perpanjangan Pengamatan

Peneliti disarankan untuk memperpanjang keterlibatan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran utama sehingga semakin lama keterlibatannya, semakin tinggi pula kredibilitas dan keakuratan data yang diperoleh.

b) Meningkatkan Ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara mendalam dan berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjamin keakuratan data.

c) Triangulasi merupakan teknik mengevaluasi data dari berbagai sumber, metode, atau waktu untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Triangulasi dibagi menjadi tiga jenis:

a. Triangulasi Sumber artinya memverifikasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

b. Triangulasi Teknik artinya mengecek data yang sama menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu artinya melakukan pengumpulan data dalam waktu atau situasi yang berbeda untuk menilai pengaruh waktu terhadap kredibilitas data.

d) Analisis Kasus Negatif.

Analisis ini membandingkan data yang tidak sesuai dengan hasil penelitian sebagai bentuk pengujian kredibilitas. Jika data yang diperoleh tetap konsisten dengan temuan utama, maka hasil penelitian dianggap kredibel.

e) Melibatkan Teman Sejawat.

Diskusi dengan rekan yang tidak terlibat dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan masukan, kritik, dan perspektif lain yang dapat meningkatkan objektivitas penelitian, mengingat kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.

f) Melakukan *Member Checking*

Member checking adalah proses verifikasi data dengan informan atau sumber data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan maksud dan konteks aslinya. Proses ini mencakup pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan, kategori analisis, interpretasi, serta kesimpulan penelitian.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* dalam penelitian kualitatif mengacu pada validitas eksternal, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi atau konteks lain. *Transferability* menggantikan konsep generalisasi dalam penelitian kuantitatif dengan menilai apakah temuan penelitian pada satu kelompok dapat diterapkan pada kelompok lain.

Penelitian kualitatif dapat meningkatkan *transferability* dengan memberikan deskripsi yang rinci mengenai konteks penelitian serta asumsi-asumsi yang

mendasarinya. Agar hasil penelitian dapat dipahami dan mungkin diterapkan di tempat lain, laporan penelitian harus disusun secara jelas, sistematis, dan terpercaya. Dengan demikian, orang lain dapat menilai apakah hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi atau lokasi berbeda.